

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inovasi sebagai proses atau produk akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan bakat untuk menciptakan atau meningkatkan item, layanan, proses, dan metode yang menawarkan nilai signifikan (Riki Satia Muatara, 2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mendefinisikan inovasi sebagai segala upaya rekayasa, penelitian, atau pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan penerapan konsep dan pengaturan ilmiah yang inovatif secara bermakna, atau untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke dalam barang jadi atau proses manufaktur. Menurut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik diartikan sebagai suatu model baru dari pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat, yang dikemukakan berdasarkan ide baru maupun yang telah ada, serta merupakan adaptasi maupun modifikasi dengan tujuan kebermanfaatannya.

Artinya inovasi adalah pelayanan yang tidak mewajibkan suatu penemuan baru, tetapi suatu pendekatan baru (Atthahara, 2018), perluasan, maupun peningkatan taraf pelayanan publik yang sudah ada (Nurdin, 2016). Contoh inovasi dalam dunia Pemerintahan berupa E-Gov, tujuannya agar instansi pemerintah bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam hal ini diperlukan tanggung jawab yang kuat dari pihak pemerintah untuk mulai merintis sesuatu yang baru dalam birokrasi (Selawati, 2022). Penggunaan E-Gov bagi sistem pemerintahan diharapkan dapat menjadi opsi sebuah reformasi birokrasi yang baru untuk mencapai sistem pelayanan yang lebih baik. Seiring dengan

adanya semangat pada sistem reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, E-Gov semakin berperan penting dalam meningkatkan taraf pelayanan publik serta menyebarkan informasi kepada masyarakat secara efektif (Selawati, 2022).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden, No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 1 Penerapan sistem E-Gov diharapkan dapat membantu birokrasi menjadi lebih efektif, transparan, efisien, dan bertanggung jawab (Lestari et al., 2021) Untuk bisa mencapainya, teknologi dioperationalkan oleh petugas yang kompeten sehingga mampu memperbaiki kualitas pelayanan baik dari sisi ekonomi, politik maupun lainnya (Atthahara, 2018)

Oleh karena itu, di Indonesia, terdapat persaingan yang ketat dan terbuka dalam skala dunia, inovasi pelayanan publik sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Yanuar, 2019). Untuk mengatasi kekurangan pelayanan publik secara langsung, diperlukan inovasi digital agar pelayanan publik berbasis digital menjadi lebih efektif dan efisien (Puji Ayu Lestari, et.al, 2021).

Kajian tentang inovasi pelayanan berbasis E-Gov selama ini fokus pada hubungan pemerintah dengan masyarakat (G-to-C) (Susanti et al., 2019), Hubungan pemerintah dengan bisnis (G-to-B) (Supriadi, 2016) dan Hubungan pemerintah dengan pemerintah (G-to-G) (Rahmadany, 2021). Tidak banyak yang mengkaji tentang inovasi layanan yang fokus pada hubungan pemerintah dengan pegawai (G-to-E). Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk menjamin bahwa pegawai negeri dan pegawai pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja di organisasi pemerintah (Indrajit et al., 2017).

Mengingat adanya perubahan arah kebijakan pemerintah yang diperlukan oleh semangat reformasi birokrasi, maka penting untuk meningkatkan kinerja

organisasi kepegawaian nasional. (Maria et al., 2020). Dalam hal ini kinerja juga bisa diartikan sebagai jasa atau hasil yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan negara, baik di pusat maupun daerah. (Hidayat, Alfatih Manggabarani, 2021). Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 yang mengatur tentang ASN menyatakan perlunya penaaalkasanaan kepegawaian yang kontemporer (maju) cepat, akurat dan berbasis data. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, peningkatan kinerja ASN berupaya untuk mendorong dan membangun sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien dengan mengutamakan profesionalisasi ASN dan kualitas pelayanan publik (Indra Syahputra, 2019).

E-government adalah salah satu sarana pemerintah jika hendakberinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat sebagai kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan (Darius Antoni, Muhamad Akbar, 2018). Penelitian ini hendak melihat inovasi pelayan Government to Employe (G to E) yang dilakukan di Kabupaten Sumenep.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerapkan Inovasi pelayanan berupa inovasi administrasi kepegawaian sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Penerapan SIMPEG di Kabupaten Sumenep dilaksanakan sejak tahun 2013. Pada SIMPEG 2013 ini hanya memuat informasi kepegawaian (Ida Syafriani, 2018). Kelemahan yang terdapat dalam SIMPEG ini adalah terkait dalam pengaksesan jaringan. Selain persoalan tersebut isu pungutan liar masih ada walaupun SIMPEG sudah diterapkan (Madura, 2021).

SIMPEG Plus ini dibuat dikarenakan beberapa faktor yaitu, keadaan geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari beberapa pulau, yang dimana

di setiap pulau terdapat banyak ASN, selain itu pengurusan yang terkesan lamban dan kurang efektif. Sesuai dengan PERBUB Kabupaten Sumenep No 58 Tahun 2022 pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan good governance terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Kondisi diperkuat dengan data tiga tahun terakhir pemanfaatan SIMPEG tidak berbanding lurus dengan tingkat pencapaian kinerja ASN di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2019 capaian kinerjanya mencapai 64,08%, mengalami penurunan di tahun 2020 di angka 49,80% dan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali di angka 43,46% (*LKJiP BKPSDM 2021.Pdf*, 2021). Sementara itu data administrasi kepegawaian pada tahun 2021 khususnya pada data kenaikan pangkat hanya mencapai 53,39% (BKPSDM, 2021).

Melalui Peraturan Bupati No 58 tahun 2022 tentang tata Kelola SPBE yang diperkuat dengan Keputusan kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep No: 188/4.6/KEP/435.203.1/2022. Berdasarkan kondisi tersebut BKPSDM melakukan pengembangan SIMPEG menjadi SIMPEG Plus di tahun 2021 dan pengaplikasiannya di tahun 2022 yang memberikan manfaat untuk para ASN. Sehingga SIMPEG yang awalnya hanya memuat informasi tentang kepegawaian setelah adanya inovasi menjadi SIMPEG Plus yang terintegrasi dengan 2 aplikasi lainnya yaitu Sistem Penilaian Harian (SILAHKAN) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi penguulan kenaikan pangkat, dan SIC merupakan aplikasi absensi online yang didalamnya terdapat tracking layanan. Tujuan adanya

SIMPEG Plus ini adalah meningkatkan kinerja ASN, meningkatkan kedisiplinan khususnya di bidang administrasi kepegawaian, selain itu untuk validasi dan akuarasi data kepegawaian dan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. SIMPEG Plus ini mulai diluncurkan dan diresmikan pada tahun 2021 dan penggunaanya dimulai pada tahun 2022.

Sistem informasi ini dirancang khusus beradaptasi dengan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain) dan sudah mendapat penghargaan dari BKN RI sebagai sebuah inovasi lantaran dianggap sukses dalam implementasi SAPK. Di dalam SIMPEG Plus ini memuat beberapa fitur seperti kenaikan pangkat jabatan fungsional, data kepegawaian, kenaikan pangkat, supaya dari inovasi yang telah diciptakan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, efektif dan efisien (Salam, 2021). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin melihat bagaimana **“INOVASI SIMPEG PLUS DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN PADA BKPSDM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Inovasi SIMPEG Plus yang ada di BKPSDM Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana cara kerja dari SIMPEG Plus untuk mempermudah administrasi ASN dalam kenaikan pangkat?
3. Bagaimana perbandingan yang diperoleh pasca penggunaan Simpeg Plus?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Inovasi SIMPEG Plus yang ada di BKPSDM Kabupaten Sumenep
2. Mengetahui cara kerja dari SIMPEG Plus untuk mempermudah pengurusan administrasi kepegawaian
3. Mengetahui perbandingan yang diperoleh pasca penggunaan SIMPEG Plus.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan sebagai media perluasan informasi yang ada khususnya terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu salah satunya adalah Inovasi pelayanan SIMPEG Plus dari BKPSDM Kabupaten Sumenep, dan hasil yang didapat dalam penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan informasi bagi pembaca yang berminat. Penelitian ini juga berkaitan dengan pemanfaatan e-gov dalam menunjang keberlangsungan pelayanan sehingga lebih efektif dan efisien.

1.4.2. Manfaat Praktis

Tujuan dari studi ini adalah untuk menetapkan standar dan acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan inovasi pelayanan publik yang ada seiring dengan pertumbuhan sistem informasi di Indonesia. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai praktik pelayanan publik inovatif yang meningkatkan kinerja ASN, khususnya di bidang sumber daya manusia. Selain itu, temuan penelitian ini menjadi bagian dari prosedur dan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, selain bermanfaat bagi organisasi pemerintah daerah.

1.5. Definisi Konseptual

1.5.1. Inovasi

Inovasi dalam Pelayanan publik kini sudah menjadi kebutuhan yang harus diterapkan oleh penyedia layanan, baik ditingkat pemerintah Pusat ataupun Daerah (Hartomi et al., 2018). Inovasi pelayanan juga tidak hanya sekedar meningkatkan pelayanan akan tetapi untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan sebagai contoh dalam pelayanan publik. Inovasi juga diperkenalkan dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Inovasi pada sektor publik merupakan sebuah cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian inovasi adalah ide, proses, dan praktik untuk di implementasikan dan ditujukan untuk mencapai sebuah hasil yang membawa perubahan terutama dalam pelayanan sektor publik. E-Government Adanya Inpres Nomor 3 tahun 2003 yang berisi mengenai E-Gov sendiri adalah salah satu bentuk sebuah reformasi pada birokrasi yang tidak hanya berfokus pada perubahan penggunaan teknologi informasi, namun juga pada perubahan sistem pada instansi pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mochammad Rozikin, Wa Hesty, 2020). Setiap inovasi dan perubahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan maksud membentuk pemerintahan dengan kualitas yang baik.

Sehingga E-Gov mengacu pada penggunaan TIK dalam proses pemerintahan sehingga terselenggaranya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Selain itu E-Gov juga dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pelaku bisnis (dunia usaha), instansi dan masyarakat.

1.5.2. Simpeg Plus

SIMPEG Plus merupakan sebuah aplikasi yang secara khusus dirancang untuk mengelola sistem manajemen kepegawaian yang dikemukakan oleh BKPSDM Kabupaten Sumenep. Aplikasi ini bersifat online sehingga para ASN dapat mengakses informasi kepegawaian dimana saja. SIMPEG ini sudah ada sejak tahun 2013 namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi SIMPEG ini mengalami inovasi menjadi SIMPEG Plus ditahun 2022 dimana sistem informasi ini dirancang khusus beradaptasi dengan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain). Di dalam SIMPEG Plus ini memuat beberapa fitur seperti kenaikan pangkat jabatan fungsional, data kepegawaian, kenaikan pangkat, oleh karena itu pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien.

1.6. Definisi Operasional

Adanya penggunaan definisi oprasional dimaksudkan menjadi tolak ukur utama ataupun variabel acuan yang memuat indeks dalam permasalahan yang sedang terjadi yaitu tentang inovasi SIMPEG Plus pada konteks kemudahan pelayanan kenaikan pangkat yang konsep tersebut meninjau teori milik Rogers (1898), adapun implementasi dari teori Rogers dituangkan dalam poin sebagai berikut:

1. Proses perencanaan inovasi SIMPEG.
 - a. Ciptaan ide inovasi SIMPEG
 - b. Latar Belakang SIMPEG
 - c. Studi kelayakan SIMPEG
2. Inovasi SIMPEG dalam memudahkan proses kenaikan pangkat ASN Kabupaten Sumenep

- a. Keuntungan relatif SIMPEG
- b. Kesesuaian inovasi SIMPEG
- c. Kerumitan inovasi SIMPEG
- d. Uji coba inovasi SIMPEG
- e. Kemudahan inovasi SIMPEG

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih berorientasi pada analisis dengan menggunakan pendekatan induktif, oleh karena itu makna dan proses sudut pandang subjektif lebih dipentingkan dalam penelitian kualitatif ini (Fadli, 2021).

Dalam deskriptif kualitatif data kana diambil dengan sebenar-benarnya, dimana metode penelitian ini menggambarkan fakta secara apa adanya terkait dengan suatu obyek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk menjabarkan suatu kondisi, kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis untuk sampai pada kesimpulan sesuai dengan tujuan awal untuk menjawab suatu pertanyaan ataupun persoalan yang sedang dibahas.

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian ini peneliti membutuhkan waktu yaitu kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, supaya tercapainya suatu hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

Penelitian ini akan di laksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beralamat di Jl. DR. Cipto, Gudang, Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417. Pemilihan tempat ini diambil karena diambil karena wilayah tersebut cocok untuk membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer ini nantinya berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia terkait adanya Inovasi SIMPEG plus ini yang diperoleh melalui wawancara.

a. Data Sekunder

Disini, penulis berperan sebagai pihak kedua karena tidak mendapatkan data dengan cara langsung. Data sekunder didalam penelitian ini berdasar pada literatur jurnal, buku, temuan penelitian terdahulu, dokumen pendukung yang disediakan oleh web instansi.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data pada peneletian ini menggunakan teknik observasi yang didasarkan pada pengamatan dengan cara sistematis terhadap gejala-gejala yang dapat dilihat dengan cara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengeumpulan data dengan cara observasi merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasar pada fakta-fakta atau data dilapangan maupun data berupa teks, melalui

pengalaman panca indra (dilihat secara langsung) tanpa adanya manipulasi apapun (Hasanah, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan untuk mengetahui kondisi dilapangan dan memahami permasalahan yang didapat dari subjek penelitian terkait Inovasi SIMPEG Plus Untuk Meningkatkan Kinerja ASN Pada BKPSDM Kabupaten Sumenep secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara dua orang terkait, dimana dalam pertemuan tersebut akan terjadi pertukaran informasi dan ide melalui sistem tanya jawab. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan Bapak Rizal selaku Operator SIMPEG Plus BKPSDM Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk mencari tahu segala informasi terkait adanya inovasi SIMPEG plus yang ada di Kabuapten Sumenep. Peneliti menggunakan teknik ini untuk meperoleh informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak mungkin untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data maupun dokumen penunjang, seperti arsip, rekaman suara, foto dan bahan lain terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti memperoleh data atau informasi dari metode dokumentasi yang merupakan data tambahan.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Proses mencermati dan menyusun secara metodus berdasarkan observasi, wawancara, serta sumber-sumber lain dengan tujuan peningkatan terhadap informasi mengenai manajemen rumah tangga. Kejadian-kejadian yang

diselidiki dan menawarkannya sebagai temuan bagi orang lain dikenal dengan istilah analisis data, sebagaimana dijelaskan oleh Noeng Muhadjir dalam (Rijali, 2018). Materi yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh peneliti sebagai kutipan kata demi kata dari wawancara dan narasi. (Rijali, 2018) menyatakan bahwa ada banyak tahapan analisis data kualitatif, yang meliputi:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data meliputi pemilihan, pemadatan, dan perubahan data mentah yang berasal dari catatan lapangan yang telah ditulis. Sejalan dengan penelitian terkait, prosedur reduksi data akan mengumpulkan berbagai informasi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan strategi pengumpulan data yang dipilih peneliti, proses ini terus berlanjut sepanjang penyelidikan, bahkan sebelum data dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Pengumpulan data dilakukan pada tahap penyajian data sehingga menimbulkan peluang untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Cara penyajian data kualitatif dapat dalam beberapa bentuk, antara lain prosa naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, serta catatan yang diambil langsung di lapangan. Bentuk-bentuk ini mencakup informasi yang mudah diakses dan disusun secara konsisten, sehingga lebih mudah untuk memahami situasi, menentukan apakah kesimpulannya akurat, atau menilai kembali data.

3. Penarikan Kesimpulan

Selama berada di lapangan, para peneliti bekerja keras untuk secara konsisten sampai pada temuan ini. Untuk memberikan bahan penelitian yang lebih jelas dan terorganisir, dianalisis, dan dikategorikan. Peneliti sekarang harus memberikan informasi yang diperoleh dari pertanyaan yang dikembangkan sebelumnya untuk membuat kesimpulan

